

## **SKRIPSI**

# **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Polsek Kecamatan Tallo Makassar Tahun 2012 - 2014)**



**OLEH  
NUR RUHYANTSANI D.I.**

**B 111 11 137**

**BAGIAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2015**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
(Studi Kasus di Polsek Kecamatan Tallo Makassar Tahun 2012 - 2014)**

Disusun dan Diajukan Oleh :  
**NUR RUHYANTSANI D.I.**  
**B 111 11 137**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
Dalam Bagian Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum

**Pada**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2015**

## **PENGESAHAN SKRIPSI**

### **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Polsek Kecamatan Tallo Makassar Tahun 2012 - 2014)**

Disusun dan diajukan oleh

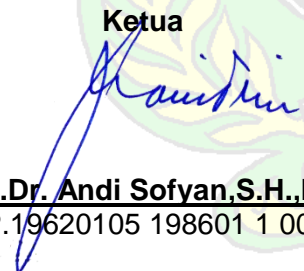
**NUR RUHYANTSANI D.I.**

**B 111 11 137**


Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada hari Rabu 3 Juni 2015  
Dan Dinyatakan Diterima

**Panitia Ujian**

**Ketua**

  
**Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H.**  
NIP. 19620105 198601 1 001

**Sekretaris**

  
**Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.**  
NIP. 19800710 200604 1 001

**An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,**

  
**Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.**  
NIP. 1961 0607 198601 1 003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

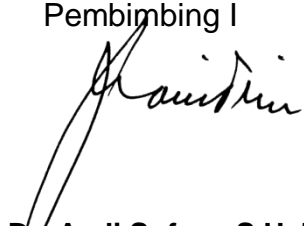
Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama Mahasiswa : NUR RUHYANTSANI D.I.  
Nomor Pokok : B 111 11 137  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP  
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Polsek  
Kecamatan Tallo Makassar Tahun 2012 -  
2014)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

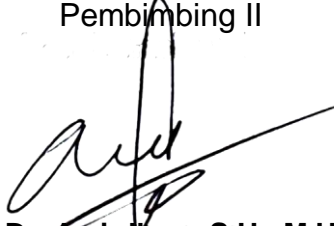
Makassar, Mei 2015

Pembimbing I



**Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H.**  
NIP. 19620105 198601 1 001

Pembimbing II



**Dr. Amir Iyas, S.H., M.H.**  
NIP. 19800710 200604 1 001

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : **NUR RUHYANTSANI D.I.**  
Nomor Pokok : B 111 11 137  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP  
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Polsek  
Kecamatan Tallo Makassar Tahun 2012 - 2014)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir Program Studi.

Makassar, Mei 2015

A.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik



**Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.**  
NIP. 1961 0607 198601 1003

## **ABSTRAK**

**Nur Ruhyantsani Dyah Ikhtiari, B 111 11 137 “TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi kasus di Polsek Kecamatan Tallo Kota Makassar Tahun 2012-2014).Dibawah arahan dan bimbingan Bapak Andi Sofyan, Selaku pembimbing I dan Amir Ilyas Selaku pembimbing II**

Penelitian ini dilaksanakan di Polsek Tallo yang bertujuan untuk mengetahui sejauh manakah tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kecamatan Tallo Kota Makassar. Untuk memperoleh data terkait dengan judul penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Bareskrim Polsek Tallo terkait kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu tahun 2012 – 2014. Di samping itu data juga diperoleh melalui kepustakaan, literatur, dokumen-dokumen, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap perempuan korban KDRT sebenarnya telah diaplikasikan ke dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan. Salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Akan tetapi dari sekian banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan perempuan belum cukup akomodatif atas kebutuhan perempuan yang dapat melindungi mereka dari tindakan kriminal KDRT.

Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan khususnya korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini bukan sekedar dalam taraf implementasi penegakan hukumnya, tetapi terakomodasinya kebutuhan masyarakat khususnya perempuan sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga ke dalam bentuk undang-undang yang benar-benar menjamin perlindungan hukum atas dirinya dan masyarakat pada umumnya. Di sinilah dibutuhkan peran kebijakan legislatif terhadap tindakan kriminal untuk mengakomodasi kebutuhan perempuan akan perlindungan hukum khususnya dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama perkenalkan penulis memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga skripsi dengan judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA** (Studi Kasus di Polsek Kecamatan Tallo Makassar 2012-2014) dapat diselesaikan dengan baik untuk diajukan sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam penulisan skripsi ini, tidak sedikit tantangan dan hambatan yang dihadapi penulis, namun berkat bimbingan, bantuan, dan perhatian semua pihak sehingga semua itu dapat dilalui dengan baik.

Pada kesempatan ini penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua tercinta ayahanda **Drs. Syaiful Rahman, M.Adm.SDA.** dan ibunda **Hj. Asniah Amir** yang selalu memberikan doa, perhatian dan spirit serta dukungan, baik moril maupun material. kepada penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya bantuan dan kerja sama yang baik dari berbagai pihak. Untuk itu, perkenalkan penulis untuk menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penelitian hingga penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada **Prof. Dr.**

**Andi Sofyan, SH.,MH.** selaku pembimbing I (satu) dan **Dr. Amir Ilyas, SH.,MH.** selaku pembimbing II (dua).

Terima kasih pula disampaikan kepada semua pihak yang telah banyak berjasa selama menimba ilmu di Universitas Hasanuddin, yang dengan ikhlas mengajar, membimbing dan berbagi pengalaman kepada penulis.

1. Prof. Dr. Dwia Ariestina, MA. Rektor Universitas Hasanuddin Makassar yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, SH.,MH. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
3. Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH.,MH, Dr. Syamsuddin Muchtar, SH.,MH, dan Dr. Hamzah Halim, SH.,MH. selaku wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Prof. Dr. Muhadar, SH.,MS, Prof. Dr. H.M. Said Karim, SH.,M.Si, Dr. Dara Indrawati, SH.,MH, selaku dewan penguji.
5. Seluruh tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu.
6. Kepala Tata Usaha dan staf Tata Usaha di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu.
7. Seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.



8. Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta staf.
9. Kapolwiltabes Kota Makassar beserta jajarannya.
10. Kapolsek Tallo Kota Makassar beserta jajarannya.
11. Kepala Pengadilan Negeri Kota Makassar beserta jajarannya.
12. A. Muchlis Amir, SH. yang telah banyak memberikan motivasi dan dukungan moril kepada penulis.
13. Edhib Hasrits Anugrah, S.A.P. (kakak tercinta) yang telah banyak memberikan spirit dan motivasi kepada penulis .
14. Teman-teman KKN gelombang 87 UNHAS di Kabupaten Bone.
15. Terima kasih kepada M. Agung Ashari Rahman yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis.
16. Terima kasih kepada sahabat terbaik penulis, Eka Astriani, Risky Sulfiyanti, S.H, Raihan Dirham Burhamzah.
17. Teman-teman seperjuangan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan di dalamnya, hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan, waktu, dan referensi yang dimiliki penulis. Untuk itu diharapkan kritik dan saran kepada semua pembaca demi kesempurnaan dari skripsi ini.

Semoga karya tulis ilmiah yang sangat sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dari terutama bagi pribadi penulis.

Dan apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kekeliruan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis. Akhirnya semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua, Amin.

Makassar, Mei 2015

**NUR RUHYANTSANI D.I.**

## DAFTAR ISI

	halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi .....	6
1. Pengertian Kriminologi .....	6
2. Ruang Lingkup Kriminologi.....	11
3. Pembagian Kriminologi.....	12
4. Aliran Pemikiran Dalam kriminologi .....	14
B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	16
1. Pengertian Tindak Pidana .....	16
2. Unsur-unsur Tindak pidana .....	21
C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	23
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	24
2. Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	25
3. Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	28
D. Teori Tentang Sebab-Sebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	28
E. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan .....	38

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>40</b>
A. Metodologi Penelitian .....	40
B. Lokasi Penelitian .....	40
C. Jenis Dan Sumber Data.....	41
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Analisis Data .....	42
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	 <b>43</b>
A. Gambaran Umum Kecamatan Tallo .....	43
B. Data Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ....	43
C. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya KDRT .....	49
D. Bentuk-bentuk Tindakan KDRT .....	53
E. Upaya-Upaya Penanggulangan KDRT .....	54
 <b>BAB V PENUTUP.....</b>	 <b>59</b>
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
 <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	 <b>61</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Rumah tangga adalah kelompok terkecil dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian pada setiap anggota keluarga. Keluarga adalah merupakan organisasi tersendiri dan perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang memimpin keluarga lainnya. Anggota keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak adalah merupakan satu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik. Hubungan yang baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar semua anggota atau individu yang ada dalam keluarga. Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan (fisik, mental, emosi, dan sosial) oleh seluruh keluarga. Ketegangan maupun konflik antara suami dan istri atau orang tua dengan anak merupakan hal yang lumrah dalam sebuah keluarga atau rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa konflik yang mulai dari awal perkawinan sampai meninggalkan dunia ini baik dan bahagia terus, namun konflik dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti secara berlebihan, karena hampir semua keluarga pernah mengalaminya. Yang menjadi berbeda adalah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan hal tersebut.

Setiap keluarga memiliki cara untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing. Apabila masalah diselesaikan secara baik dan sehat maka setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga yaitu menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga. Penyelesaian konflik secara sehat terjadi bila masing-masing anggota keluarga tidak mengedepankan kepentingan pribadi, dan mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang sama-sama menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi yang baik. Atau dengan kata lain, apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin terjadi dalam keluarga. Di sisi lain ada keluarga yang merasa frustrasi dan kurang bijak dalam mengambil keputusan sehingga masalah tersebut menjadi hal yang sangat besar yang kemudian berujung pada tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan pada anggota keluarga tersebut.

Berbagai pendapat, persepsi dan definisi mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Pada umumnya orang berpendapat bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah urusan intern rumah tangga. Sebagian orang memandang sebagai hal yang tabu apabila sampai ada campur tangan dari pihak di luar lingkup keluarga tersebut yang kemudian ikut dalam masalah yang sedang terjadi pada kehidupan rumah tangga keluarga tersebut. Misalnya, jika ada seorang anak yang dipukuli sampai babak belur di dalam lingkup lingkungan rumahnya walaupun ia sudah berteriak minta tolong, orang

akan tetap merasa segan untuk memberikan pertolongan. Hal itu dikarenakan orang merasa tidak pantas apabila mencampuri urusan intern keluarga mereka.

Berbagai kasus mengenai tindak kekerasan yang terjadi pada suatu keluarga dan kemudian berujung fatal, terkuat dalam berbagai media yang beredar dalam masyarakat. Dan kemudian telah menjadi suatu tern bahwa masyarakat dan aparat berpendapat bahwa diperlukan adanya suatu undang-undang yang tegas sebagai landasan untuk bertindak apabila sewaktu-waktu terjadi tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di dalam kehidupan suatu keluarga.

Sementara wujud kepedulian pemerintah Indonesia terhadap maraknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah dengan disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang UUPKDRT yang secara jelas dan tegas mengatur sanksi bagi pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun belum dapat dikatakan memberikan hasil yang memuaskan karena perilaku kejahatan pada umumnya dapat timbul karena berbagai masalah seperti : ekonomi, sosial, politik dan banyak hal lainnya. Hal itu tidak hanya terjadi di Indonesia saja tetapi hampir di seluruh negara-negara di dunia sehingga kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut menjadi masalah global yang kerap mengenyampingkan Hak Asasi Manusia (HAM).

Bertolak dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan kekerasan dalam rumah tangga tersebut, dengan mengkaitkan beberapa aspek seperti

wilayah, ekonomi, tingkat pendidikan pekerjaan dalam sistem pergaulan hidup masyarakat yang berada di kecamatan Tallo yang merupakan salah satu daerah di kota Makassar yang memiliki 15 (lima belas) kelurahan dan masih tergolong daerah yang cukup rawan akan berbagai macam tindak kejahatan, khususnya kejahatan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) sebagai permasalahan di alami masyarakat yang kemudian penulis tuangkan dalam tulisan skripsi, dengan judul : **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”** (Studi Kasus Di Polsekta Kecamatan Tallo Kota Makassar Tahun 2012-2014).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Tallo Kota Makassar ?
2. Bagaimanakah bentuk tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi dikalangan masyarakat di Kecamatan Tallo ?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam mengurangi/menanggulangi tindak kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Tallo Kota Makassar ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :



- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Tallo Kota Makassar
- b. Untuk mengetahui bentuk tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi dikalangan masyarakat di Kecamatan Tallo.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam mengurangi/menanggulangi tindakan kekerasan dalam rumah tangga

## **2. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan penulis dan pembaca tentang fenomena kekerasan dalam rumah tangga.

- b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi para pengambil keputusan, khususnya bagi para penegak hukum, sehingga ada upaya peningkatan kemampuan bagi para penegak hukum dalam penyelesaian masalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

- c. Sebagai bahan referensi untuk penelitian yang akan datang

Penelitian ini dapat dijadikan referensi sebagai bahan perbandingan bagi peneliti di masa-masa yang akan datang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi

##### 1. Pengertian Kriminologi

Dalam berbagai literatur kepustakaan, kriminologi pertama kali diberi nama oleh **Paul Topinard** seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan.<sup>1</sup>

Kemudian **Cesaria Beccaria** (1738-1798) mempopulerkan istilah kriminologi sebagai reformasi terhadap hukum pidana dan bentuk hukuman.<sup>2</sup>

Menurut **J. Constant**, Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab serta akibat-akibatnya.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut **WME. Noach**, kriminologi adalah :

Ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.<sup>4</sup>

Menurut **Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey**, kriminologi adalah :

*“Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crimes as social phenomenon. It includes within its scope the*

---

<sup>1</sup> Yesmil Anwar, *at.al*, 2013, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 2-5

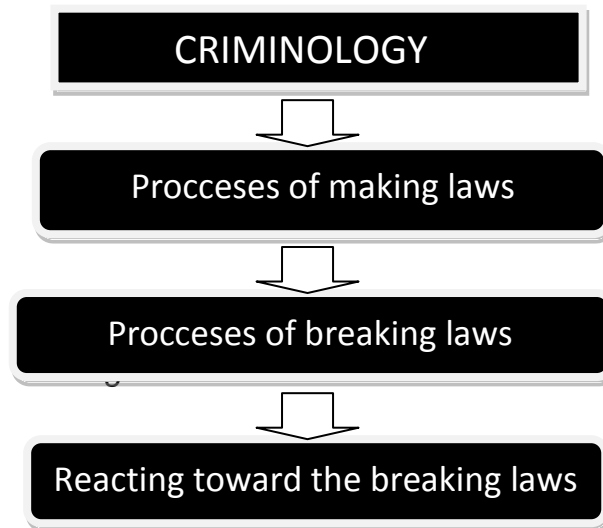
<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Topo Santoso, *at.al*, 2001, *Kriminologi*, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 9

*process of making law, the breaking of law, and reacting of word the breaking of law ...*<sup>5</sup>

Skema : 1



**Sumber** : Buku Kriminologi, Yesmil Anwar ( 2013 : 6)

Dari gambar di atas mengandung pengertian, bahwa yang termasuk ke dalam pengertian kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum. Maka dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari kejahatan saja, tetapi juga mempelajari bagaimana hukum itu berjalan.<sup>6</sup>

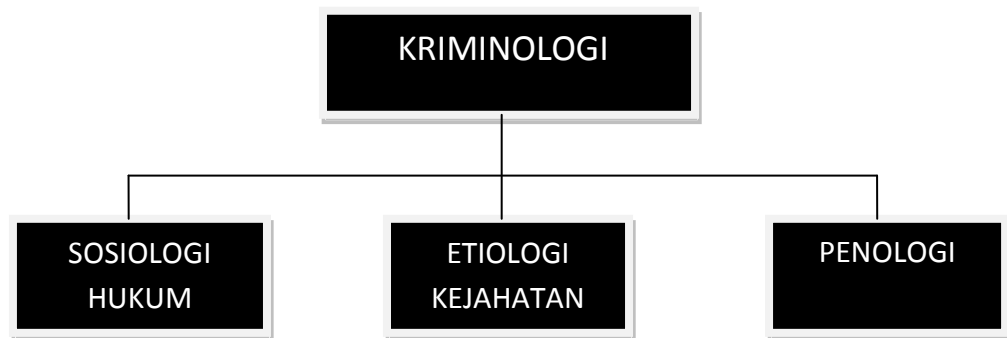
Kriminologi menurut pandangan Menurut **Edwin H.Sutherland dan Donald R. Cressey**, kriminologi adalah dibagi menjadi tiga cabang utama, seperti gambar di bawah ini :

---

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup> Yesmil Anwar *loc.cit*, 2013, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 6-7

Skema : 2



**Sumber** : Buku Kriminologi, Yesmil Anwar ( 2013 : 7)

Dari ketiga cabang kriminologi di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sosiologi Hukum (*Sociology of law*). Dalam pandangan sosiologi hukum, bahwa kejahatan itu dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan suatu perbuatan itu merupakan kejahatan adalah hukum.
2. Etiologi Kejahatan; merupakan cabang kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan.
3. Penologi; merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan, baik refresif maupun preventif.<sup>7</sup>

**W.A. Bonger** sebagai pakar kriminologi, mengatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan gejala kejahatan dalam arti seluas-luasnya. Yang dimaksud dengan mempelajari kejahatan seluas-luasnya adalah termasuk mempelajari penyakit sosial (pelacuran, kemiskinan, gelandangan, dan alkohiolisme).<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> Ibid

Menurut **W.A. Bonger**, Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. **Bonger** kemudian membagi kriminologi murni yang mencakup :

- a. *Criminal Antropology*, merupakan ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (*somatios*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa dan apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
- b. *Criminal Sosiologi* : ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat yang ingin menjawab sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
- c. *Criminal Psychology* : ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut jiwanya.
- d. *Psikopatologi* dan *Neuropatologi* Kriminal : ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa.
- e. *Penology* : ilmu tentang berkembangnya hukuman dalam hukum pidana. Adalah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.<sup>9</sup>

**Paul Mudigdo Mulyono** memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.<sup>10</sup> Sedangkan **Michael dan Alder** berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh anggota masyarakat.<sup>11</sup>

Menurut **Wolfgang, Savitz, dan Johnston** dalam "*The sociology of crime and delinquency*" memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan

---

<sup>9</sup> Yesmil Anwar, *loc.cit*, hal. 7- 8

<sup>10</sup> Topo Santoso, *loc.cit*S, 2014, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 11-12

<sup>11</sup> Ibid

mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Jadi obyek studi kriminologi meliputi :

- a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan.
- b. Pelaku kejahatan, dan,
- c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.<sup>12</sup>

Ketiganya ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat.

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan dan upaya-upaya penaggulangnya.

Selain definisi-definisi di atas, secara singkat kriminologi dapat dikatakan sebagai berikut :

- a. **Stephan Hurwitz** : Kriminologi sebagai bagian dari “*criminal science*” yang dengan penelitian empiriknya atau nyata berusaha untuk memberikan gambaran tentang faktor-faktor kriminilitas (*etiology of crime*).
- b. **Wilhem Sauer** : kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan oleh individu dan bangsa-

---

<sup>12</sup> Ibid

bangsa yang berbudaya. Sehingga yang menjadi obyek dalam penelitian kriminologi adalah perbuatan individu (*tat und tater*); serta perbuatan/kejahatan.

- c. **J.M. van Bemmelem** : suatu ilmu yang mencari sebab-sebab dari kelakuan-kelakuan asusila.
- d. **Wolfgang dan Johnston** dalam *The sociology of crime and delinquency*, memberikan definisi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.<sup>13</sup>

## 2. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut **A.S. Alam**, ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu :

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).  
Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*Process of making laws*) meliputi :
  - a. Definisi kejahatan
  - b. Unsur-unsur kejahatan
  - c. Relativitas pengertian kejahatan
  - d. Penggolongan kejahatan
  - e. Statistik kejahatan
2. Etiologi criminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*) meliputi :

---

<sup>13</sup> Yesmil Anwar, *loc.cit.* hal. 9-10

- a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi.
- b. Teori-teori kriminologi
- c. Berbagai perspektif kriminologi
- 3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum, (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*). Selanjutnya yang di bahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*reacting Toward the breaking laws*) meliputi :
  - a. Teori-teori penghukuman
  - b. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik berupa tindakan *pre-emptif*, *preventif*, *represif*, dan *rehabilitative*<sup>14</sup>.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa kriminologi mempelajari tentang kejahatan yaitu norma-norma yang ada dalam peraturan pidana, yang kedua yaitu mempelajari pelakunya yang sering disebut penjahat. Dan yang ketiga bagaimana tanggapan dan reaksi masyarakat terhadap gejala-gejala timbul dalam masyarakat.

### 3. Pembagian Kriminologi

Menurut **A.S. Alam** kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar, yaitu

#### a. Kriminologi Teoritis

Secara teoritis kriminologi ini dapat di pisahkan kedalam lima cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis.

Kelima cabang pengetahuan tersebut, terdiri atas :

1. Antropologi Kriminal :  
Antropologi criminal merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari

---

<sup>14</sup> A.S. Alam, 2010, *Kriminologi*, Pustaka Refleksi Book's, Makassar, hal. 2.



seorang penjahat. Misalnya: menurut **C. Lambroso**, ciri seorang penjahat diantaranya : tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol keluar, dahinya mencong, dan seterusnya.

2. Sosiologi Kriminal :

Sosiologi criminal merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial yang termasuk di dalam kategori sosiologi criminal adalah :

- a. Etiologi Sosial : yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan.
- b. Geografis : Yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dengan kejahatan.
- c. Klimatologis : yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara cuaca dan kejahatan.

3. Psikologi Kriminal :

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa. Yang termasuk dalam golongan ini adalah :

- **Tipologi** : Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan penjahat.
- **Psikologi sosial criminal** : Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu jiwa sosial.

4. Psikologi dan Neuro Pathology Kriminal : Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa/gila. Misalnya mempelajari penjahat-penjahat yang masih di rawat di rumah sakit jiwa, seperti : Rumah sakit Jiwa Dadi Makassar

5. Penologi : Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan faedah hukum.<sup>15</sup>

b. Kriminologi Praktis : yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Dapat pula disebutkan bahwa kriminologi praktis merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan (*applied criminology*). cabang-cabang dari kriminologi praktis ini adalah :

- Hygiene Kriminal : yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya meningkatkan perekonomian rakyat, penyuluhan (*guidance and counseling*) penyediaan sarana olahraga, dan lainnya.
- Politik Kriminal : yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan

---

<sup>15</sup> Ibid

lagi. Untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya. Maka di perlukan keyakinan serta pembuktian, sedangkan untuk dapat memperoleh semuanya itu di perlukan penyelidikan tentang bagaimanakah teknik si penjahat melakukan kejahatan.

- Kriminalistik (*police scientific*)  
Ilmu penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.<sup>16</sup>

Di samping **Bonger** membagi lima bagian cabang kriminologi sebagaimana telah diuraikan di atas, ia juga mengatakan bahwa ada “kriminologi Terapan” yaitu :

1. Hygiene Kriminil, yakni usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya penerapan Undang-Undang
2. Politik Kriminal. Usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan telah terjadi.
3. Kriminalistik (*police Scientific*); merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyelidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

#### 4. Aliran Pemikiran Dalam kriminologi

Dalam kriminologi, di kenal beberapa macam aliran pemikiran.

Aliran pemikiran dari kriminologi itu sendiri menurut **I.S.Susanto** adalah :

Cara pandang ( kerangka acuan, perspektif, paradigma) yang di gunakan oleh para kriminolog dalam melihat, menafsirkan, menanggapi dan menjelaskan fenomena kejahatan.<sup>17</sup>

Dalam kriminologi dikenal tiga aliran pemikiran untuk menjelaskan fenomena kejahatan yaitu kriminologi klasik, positif dan kritis, yaitu :

---

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> I.S. Susanto, 1991, Diktat Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hal 12.

#### a. Kriminologi Klasik

Sepertinya halnya dengan pemikiran klasik pada umumnya yang menyatakan bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri-ciri yang fundamental manusia dan menjadi dasar untuk memberikan penjelasan perilaku manusia, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok, maka masyarakat di bentuk sebagaimana adanya sesuai dengan pola yang dikehendakinya. Ini berarti bahwa manusia mengontrol nasibnya sendiri, baik sebagai individu maupun masyarakat.

Begitu pula kejahatan dan penjahat pada umumnya dipandang dari sudut hukum, artinya kejahatan adalah perbuatan yang di larang oleh undang-undang pidana, sedangkan penjahat adalah orang yang melakukan kejahatan.

Tanggapan rasional yang diberikan oleh masyarakat adalah agar individu tidak melakukan pilihan dengan berbuat kejahatan, yaitu dengan cara meningkatkan kerugian yang harus di bayar dan sebaliknya dengan menurunkan keuntungan yang dapat diperoleh dari melakukan kejahatan.

Dalam hubungan ini, maka tugas kriminologi dalah membuat pola dan menguji seitem hukuman yang akan meminimalkan tindak kejahatan.

#### b. Kriminologi Positivis

Aliran pemikiran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik yang berupa faktor biologis maupun kultural. Ini berarti bahwa manusia bukan mahluk yang terbatas untuk berbuat menurut dorongan kehendaknya dan intelegensinya, akan tetapi makhluk yang dibatasi atau ditentukan oleh situasi biologis atau kulturalnya. Aliran positivis dalam kriminologi

mengarahkan pada usaha untuk menganalisis sebab-sebab perilaku kejahatan melalui studi ilmiah ciri-ciri penjahat dari aspek fisik, sosial dan kultural. Oleh karena kriminologi positivis dalam hal-hal tertentu menghadapi kesulitan untuk menggunakan batasan undang-undang, akibatnya mereka cenderung untuk memberikan batasan kejahatan secara alamiah, yaitu lebih mengarahkan pada batasan terhadap ciri-ciri perilaku itu sendiri dari pada perilaku yang didefinisikan oleh undang-undang.

#### c. Kriminologi Kritis

Aliran pemikiran ini tidak berusaha untuk menjawab persoalan – persoalan apakah perilaku manusia itu bebas ataukah ditentukan, akan tetapi lebih mengarahkan pada proses-proses yang dilakukan oleh manusia dalam membangun dunianya di mana dia hidup. Dengan demikian akan mempelajari proses-proses dan kondisi-kondisi yang mempengaruhi pemberian batasan kejahatan kepada orang-orang dan tindakan tertentu pada waktu dan tempat tertentu.<sup>18</sup>

### B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana di dalam kitab undang-undang hukum pidana tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan istilah *strafbaar feit* tersebut. Menurut **Van Bemmelen** istilah *strftbaar feit*

---

<sup>18</sup> Ibid

itu sendiri berasal dari bahasa Belanda, dimana *feit* berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*. Sedangkan, *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah istilah *strafbaar feit* adalah sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.<sup>19</sup>

Selain daripada istilah *strafbaar feit*, dipakai juga istilah lain, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Perancis disebut *delit* dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah *delik*.

Dimana dalam Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip **Leden Marpuang**, *delik* merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.<sup>20</sup>

Di dalam bahasa Indonesia terdapat juga istilah lain yang dapat ditemukan dalam beberapa buku hukum pidana dan beberapa perundang-undangan hukum pidana, yaitu : peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana. Dalam peraturan perundang-undangan hampir semua menggunakan istilah tindak pidana, tetapi tidak ada keterangan lebih jauh tentang maksudnya.

Oleh karena itu dalam ilmu hukum pidana terdapat beraneka ragam pengertian tindak pidana yang diciptakan oleh para sarjana hukum pidana.

Menurut **Van Hamel**, tindak pidana adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain. Sedangkan menurut **D. Simons**,

---

<sup>19</sup> P.AT. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.7

<sup>20</sup> Leden Marpuang, 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 7

Tindak Pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.<sup>21</sup>

Alasan dari **D. Simons** yang merumuskan tindak pidana seperti diatas adalah karena :

- a. Untuk adanya suatu tindak pidana itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.<sup>22</sup>

Setiap tindak pidana *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu "*onrechtmatige handeling*".

Menurut **Hazewinkel-Suringa**, tindak pidana adalah :

"Suatu perilaku manusia yang ada pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya."<sup>23</sup>

Menambahkan pernyataan diatas, **Profesor Pompe** juga memandang tindak pidana itu dari 2 (dua) segi, yaitu :

- a. Dari segi teoritis, tindak pidana dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib umum) yang dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap

---

<sup>21</sup> Adami Chazawi, 2009, Hukum Pidana Positif Penghinaan, PMN, Surabaya, hal. 16-17

<sup>22</sup> Leden Marpaung, loc.cit. hal. 8

<sup>23</sup> P.A.F. Lamintang, loc.cit. hal. 185

pelaku tersebut dalam perlu, demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

- b. Dari segi hukum positif, tindak pidana adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>24</sup>

Selanjutnya, **Pompe** menyatakan bahwa perbedaan antara segi teoritis dan segi hukum positif tersebut hanya bersifat semu, oleh karena dari segi teoritis tidak seorangpun dapat dihukum kecuali apabila tindakan itu benar-benar bersifat melawan hukum dan telah dilakukan dengan kesalahan, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, sedang hukum positif kita pun tidak mengenal adanya suatu kesalahan tanpa adanya suatu perbuatan melawan hukum.

Menurut **H.R Abdussalam**, tindak pidana adalah : Perbuatan melakukan dan tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang yang bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat sehingga dapat diancam pidana.<sup>25</sup>

Menurut **Wirjono Prodjodikoro**, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.<sup>26</sup>

Sedangkan menurut **Moeljatno**, jika melihat pengertian tindak pidana dari beberapa sarjana tersebut diatas, maka pada pokoknya ternyata bahwa :

- a. *Feit* dalam *starftbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku berbeda dengan pengertian “perbuatan” dalam

---

<sup>24</sup> Ibid

<sup>25</sup> Abdussalam, 2006, Prospek Hukum Pidana Indonesia, Restu Agung, Jakarta, hal. 3

<sup>26</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 1

pidana. Perbuatan adalah kelakuan ditambah dengan kejadian yang di timbulkan oleh kelakuan yang dapat menimbulkan akibat dan bukan kelakuan saja.

- b. Pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi berbeda dengan “perbuatan pidana”, sebab perbuatan pidana tidak di hubungkan dengan kesalahan merupakan pertanggung jawaban pidana bagi orang yang melakukan perbuatan pidana.<sup>27</sup>

Perbuatan pidana hanya menunjuk pada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau di langgar.

Apakah yang itu benar-benar dipidana seperti yang sudah diancamkan, ini tergantung kepada keadaan batinnya dari pertanggung jawaban pidana, dipisahkan dengan kesalahan. Lain halnya dengan *strafbaar feit* di dalamnya di cakup pengertian perbuatan dan kesalahan.

**Moeljatno** menambahkan, memakai istilah perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *starftbaar feit*, mengartikan perbuatan pidana sebagai berikut : perbuatan pidana disamakan dengan istilah di inggris yakni *criminal act* yang berarti akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum, dimana *crimal act* tersebut dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana/responsibility. Untuk adanya resposibilty (untuk dapat dipidananya seseorang) selain melakukan *criminal act* (perbuatan pidana) orang itu juga harus mempunyai kesalahan.berdasarkan berbagai penjelasan tentang tindak pidana, maka dapat di simpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum, baik sengaja atau tidak yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Ciprta, Jakarta, hal. 61

<sup>28</sup> Ibid



## 2. Unsur-unsur Tindak pidana

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dalam buku III memuat pelanggaran.

Ternyata ada unsur yang selalu di sebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada pengecualian seperti pasal 351 KUHP (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab.

Di samping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Menurut **Adami Chazawi**, dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu :

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana;<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Adami Chazawi, 2002, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Pidana Bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 82

Dari 11 unsur itu, di antaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif.

Unsur melawan hukum adakalanya bersifat objektif, misalnya melawan hukumnya perbuatan mengambil pada pencurian (Pasal 362 KUHP) terletak bahwa dalam mengambil di luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif). Atau pada pasal 251 KUHP pada kalimat “tanpa izin pemerintah”, juga pada pasal 253 pada kalimat “menggunakan cap asli secara melawan hukum objektif”.

Akan tetapi ada juga melawan hukum subjektif misalnya melawan hukum dalam penipuan (pasal 378 KUHP), pemerasan (pasal 368 KUHP), pengancaman (pasal 369 KUHP) di mana disebutkan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Begitu juga unsur melawan hukum pada perbuatan memiliki dalam penggelapan (pasal 372 KUHP) yang bersifat subjektif, artinya terdapat kesadaran bahwa memiliki benda orang lain yang ada dalam kekuasaannya itu merupakan celaan masyarakat

Mengenai kapan unsur melawan hukum itu berupa melawan hukum objektif dan subjektif bergantung dari bunyi redaksi tindak pidana yang bersangkutan. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur-unsur yang berada di luar batin manusia/si pembuat yakni semua unsur perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan objektif tindak pidana. Sementara itu,

unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.

### C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Istilah kekerasan digunakan oleh **John Conrad** dengan istilah "*criminally violence*", sedangkan **Clinard dan Quenney** menggunakan istilah "*criminal violence*". Di Kolumbia istilah kekerasan dikenal dengan "*La Violencia*". Kekerasan pada dasarnya adalah merupakan tindakan agresif, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit, semua itu adalah bentuk-bentuk kekerasan.

Menurut **Yesmil Anwar dan Adang**, kejahatan kekerasan diartikan sebagai :

"Penggunaan kekuatan yang bertentangan dengan kemauan orang lain, dan yang berakibat atau berakibat pembinasaan, atau kerugian pada orang lain, atau harta benda, atau hilangnya kemerdekaan orang lain".<sup>30</sup>

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), dan baik yang bersifat menyerang (*opensive*) ataupun yang bersifat tertutup (*deponsive*) yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Kekerasan (*violence*), menurut sebagian ahli disebut sedemikian rupa sebagai tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik maupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, oleh karena itu kekerasan adalah sebagai suatu bentuk kejahatan.

---

<sup>30</sup> Yesmil Anwar, loc.cit, hal. 411

## **1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Pengertian kekerasan secara yuridis dapat dilihat pada pasal 89 kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu “Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)”.

Pingsan diartikan hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Kemudian, tidak berdaya dapat diartikan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sama sekali, tetapi seseorang tiada berdaya masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Pengertian kekerasan tersebut di atas dapat dikatakan penganiayaan.

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut pasal 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah :

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa undang-undang tersebut bukan hanya semata-mata diberlakukan untuk kepentingan perempuan saja, melainkan semua orang dan mereka yang mengalami subordinasi khusus dalam lingkup rumah tangga.

Undang-Undang di atas menyebutkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah segala jenis kekerasan (baik fisik maupun psikis) yang dilakukan oleh anggota keluarga kepada anggota keluarga

yang lain ( yang dilakukan oleh suami kepada istri dan anaknya, atau oleh ibu kepada anaknya, atau sebaliknya).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, anak, atau pembantu rumah tangga. Namun secara umum pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga lebih dipersempit artinya sebagai penganiayaan oleh suami terhadap istri. Meskipun demikian tidak tertutup kemungkinan “suami” dapat pula sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh istrinya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa segala tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan melanggar hak asasi manusia yang dapat dikenakan sanksi hukum pidana maupun perdata.

## **2. Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Dari beberapa definisi diatas menurut UU No 23 tahun 2004 pasal 5, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dibagi menjadi empat, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.

- a. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbentuk kekerasan fisik, kekerasan ini memiliki arti perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, seperti : memukul, menempar, mencekik, dan sebagainya.
- b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbentuk kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk

bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan ini mencakup penyiksaan secara emosional dan verbal terhadap korban, sehingga melukai kesehatan mental dan konsep diri perempuan. Kekerasan ini dapat berupa hinaan kepada istri, celaan, makian, ancaman akan melukai atau membunuh istri dan anak-anak, melarang istri mengunjungi keluarga atau teman, rasa cemburu atau rasa memiliki yang berlebihan, merusak barang-barang milik pribadi, mengancam untuk bunuh diri, melakukan pengawasan dan manipulasi, mengisolasi perempuan dari kebutuhan dasarnya (nafkah lahir dan batin) dan menanamkan rasa takut sedemikian rupa terhadap istri.

- c. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbentuk kekerasan seksual.

Kata kesusilaan dalam kamus Bahasa Indonesia yang disusun oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang diterbitkan oleh Balai Pustaka (1990 : 874), bahwa “kesusilaan” diartikan : “perihal susila; yang berkaitan dengan adab dan sopan santun”<sup>31</sup>

Kata “susila” dalam Bahasa Inggris adalah *moral, ethics, decent*.

Kata *ethics* diartikan sebagai :

“.....*pertaining to right and wrong in conduct.*”  
(berkenaan dengan sikap/tabiati/tingka laku yang baik dan salah/buruk).<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 874

<sup>32</sup> Laden Marpaung, 2008, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 3

Jika diamati berdasarkan kenyataan sehari-hari, persepsi masyarakat tentang arti “kesusilaan” lebih condong pada : *“behavior as to right or wrong, esp in relation to sexual matter”*<sup>33</sup>

Dengan demikian, makna dari “kesusilaan” adalah berkenaan dengan moral, etika yang telah diatur dalam perundang-undangan.

**Jim Hopper** dalam artikelnya yang berjudul “*Sex Abuse of Males*” mengatakan bahwa : apabila terjadi kejahatan yang menjadi sorotan tajam dalam pelanggaran norma kesusilaan adalah kejahatan seksual (*sex crime*) tentang tindak pidana pemerkosaan yang merupakan salah satu bentuk kejahatan terbesar.<sup>34</sup>

**M. Sudrajat Bassar**, mengatakan bahwa “kesusilaan ialah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam berhubungan antara berbagai anggota masyarakat tetapi khusus yang sedikit banyaknya mengenai kelamin (*sex*) seorang manusia”. Sedangkan menurut **Soetandyo Wignjosebroto**, menjelaskan tentang pengertian perkosaan adalah : suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral atau hukum yang berlaku adalah melanggar”.<sup>35</sup>

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dijelaskan bahwa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

---

<sup>33</sup> Ibid

<sup>34</sup> Yesmil Anwar, loc.cit

<sup>35</sup> Ibid

Dalam pengertian di atas, maka tindak pidana perkosaan termasuk dalam tindak pidana yang melanggar kesusilaan, karena tindak pidana perkosaan termasuk ke dalam kejahatan seksual.

### **3. Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Ruang lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Lingkup keluarga atau rumah tangga meliputi, suami, istri, anak dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut.

Setiap orang dalam rumah tangga berpotensi menjadi korban kekerasan, siapapun yang merasa ter subordinasi dan menerima perlakuan kekerasan oleh pihak lain dalam rumah tangga tersebut. Sehingga korban kekerasan dalam rumah tangga bisa saja suami, istri, anak, anggota keluarga yang hidup dalam rumah tangga dan orang yang bekerja dalam rumah tangga, misalnya pembantu rumah tangga.

#### **D. Teori Tentang Sebab-Sebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga terjadi disebabkan oleh pemahaman anggota keluarga tentang hak dan kewajiban yang tidak mampu mereka tunaikan secara wajar dan baik.

Menurut **H. Mannheim** sebagaimana dikutip oleh **I.S. Susanto**, membedakan teori-teori sosiologi kriminal ke dalam :



## 1. Teori yang berorientasi pada kelas sosial

Yaitu teori-teori yang mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial, perbedaan di antara kelas sosial serta konflik diantara kelas-kelas sosial yang ada. Termasuk dalam teori ini adalah anomie dan teori-teori sub budaya delinkuen.

### a. Teori Anomie

Ahli sosiologi perancis **Emile Durkheim** yang teorinya menekankan pada “ *normallessness, lessens social control*” yang berarti mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap kemerosotan moral yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan kerap kali terjadi konflik norma dalam pergaulan. Tren sosial dalam masyarakat industri perkotaan modern mengakibatkan perubahan norma, kebingungan dan berkurangnya control sosial individu. Individualisme meningkat dan timbul berbagai gaya hidup baru yang besar kemungkinan menciptakan kebebasan yang lebih luas di samping meningkatkan kemungkinan perilaku yang menyimpang, seperti kebebasan seks dikalangan anak muda.<sup>36</sup>

### b. Teori sub budaya delinkuensi

Teori ini mencoba mencari sebab-sebab kenakalan remaja dari perbedaan kelas di antara anak-anak yang diperolehnya dari keluarganya. **Cohen** dalam teorinya “*Lower Class Reaktion Theory*” sebagaimana dikutip **A.S. Alam**, yang inti teorinya ini adalah delinkuensi timbul dari

---

<sup>36</sup> I.S. Susanto, loc.cit

reaksi kelas bawah terhadap nilai-nilai kelas menengah yang dirasakan oleh remaja kelas bawah sebagai tidak adil dan harus dilawan.<sup>37</sup>

**Cohen** menjelaskan pelaku-pelaku delinkuensi merupakan bentuk sub-budaya terpisah dan memberlakukan sistem tata nilai masyarakat luas.

Ia menggambarkan sub-budaya sebagai sesuatu yang diambil norma-norma budaya yang lebih besar, namun dibelokkan secara terbalik dan berlawanan.

Perilaku delinkuen dianggap sebagai sesuatu yang benar menurut tata nilai budaya mereka karena perilaku tersebut dianggap keliru oleh norma-norma budaya yang lebih besar.

## 2. Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial

Yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan tidak dari kelas sosial tetapi dari aspek yang lain seperti lingkungan, kependudukan, kemiskinan dan sebagainya. Termasuk dalam teori ini adalah teori-teori ekologis, teori konflik kebudayaan, teori faktor ekonomi dan *differential association*.

### a. Teori Ekologis

Menurut **I.S Susanto**, teori-teori ini mencoba mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek-aspek tertentu baik dari lingkungan manusia maupun sosial seperti :

- Kepadatan penduduk
- Mobilitas penduduk
- Daerah kejahatan dan perumahan kumuh.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> A.S. Alam, loc.cit. hal. 53

<sup>38</sup> I.S. Susanto, loc.cit.

b. Teori konflik kebudayaan

Menurut **Selin** sebagaimana dikutip **I.S Susanto**, semua konflik kebudayaan adalah konflik dalam nilai sosial, kepentingan dan norma-norma. Selanjutnya dikatakan bahwa konflik yang demikian kadang-kadang sebagai hasil dari perpindahan norma-norma perilaku daerah atau budaya yang satu ke yang lain dan dipelajari sebagai konflik mental atau sebagai benturan nilai kultural. Konflik norma-norma atau tingkah laku dapat timbul dalam berbagai cara seperti adanya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku di antara aturan-aturan kultural yang berbeda dapat terjadi antara lain :

- Bertemunya dua budaya besar
- Budaya besar menguasai budaya kecil
- Apabila anggota dari suatu budaya pindah ke budaya lain.<sup>39</sup>

c. Teori faktor ekonomi

Menurut **I.S Susanto**, hubungan antara faktor ekonomi dan kejahatan agaknya perlu dipertimbangkan beberapa hal :

1. Teknik studi

Dalam mempelajari pengaruh faktor ekonomi dilakukan antara lain dengan cara :

- a) Menguji keadaan ekonomi dari kelompok pelanggar dengan membandingkan kedudukan ekonomi dari yang bukan pelanggar sebagai control.
- b) Dengan menyusun indeks ekonomi yang didasarkan pada kondisi ekonomi di suatu Negara atau daerah dan membandingkan fluktuasinya dengan kejahatan, dan
- c) Melalui studi kasus yaitu dengan menggambarkan pengaruh kondisi ekonomi dari individu yang bersangkutan terhadap perilaku kejahatannya.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Ibid

<sup>40</sup> Ibid

## 2. Batasan dan pengaruh dari kemiskinan dan kemakmuran

Dengan munculnya konsep baru yang melihat kemiskinan sebagai konsep dinamis dan relatif yang menggantikan konsep lama yakni kemiskinan sebagai konsep absolut dan statis, yang berarti ukuran kemiskinan berbeda menurut tempat dan waktu.

### d. Teori *differential association*

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu bahwa perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari.

Menurut **Shuterland**, perilaku kejahatan adalah perilaku manusia yang sama dengan perilaku manusia pada umumnya yang bukan kejahatan.<sup>41</sup>

Menurut **Abdulsyani**, bahwa sebab-sebab timbulnya kriminalitas dapat dijumpai dalam berbagai faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas tertentu, sehingga faktor lain dapat menimbulkan jenis kriminalitas.

### 1. Faktor yang bersumber dari dalam individu (*intern*)

#### a) Sifat khusus individu

Sifat khusus adalah keadaan psikologis dari individu. Masalah kepribadian seringkali dapat menimbulkan kelakuan yang menyimpang, lebih-lebih jika seorang (individu) dapat dikategorikan tertekan perasaannya. Orang yang tertekan perasaannya mempunyai kecenderungan untuk melakukan

---

<sup>41</sup> Yesmil Anwar, loc.cit.

penyimpangan dan penyimpangan ini mungkin terhadap sistem sosial ataupun terhadap pola-pola kebudayaan.

Ada beberapa sifat khusus yang dapat menimbulkan kejahatan, yaitu :

1. Sakit jiwa : orang yang terkena sakit jiwa mempunyai kecenderungan untuk bersikap anti sosial. Sakit jiwa ini bisa diakibatkan oleh adanya konflik mental yang berlebihan, atau mungkin juga karena pernah melakukan perbuatan yang dirasakan sebagai dosa besar dan berat, sehingga ia menjadi sakit jiwa.
2. Daya emosional : masalah emosional erat hubungannya dengan masalah sosial yang dapat mendorong seseorang untuk berbuat penyimpangan. Ini dapat mengarah kepada suatu perbuatan kriminal jika seseorang tersebut tidak mampu untuk mencapai keseimbangan antara emosinya dengan kehendak masyarakat.
3. Rendahnya mental : ada hubungannya dengan daya intelegensia. Jika seseorang mempunyai daya intelegensia yang tajam dan dapat menilai realitas, maka semakin mudah ia untuk dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat.
4. Anomi : secara psikologis, kepribadian manusia itu sifatnya dinamis, yang ditandai dengan adanya kehendak-kehendak tersebut bersandar pada manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai ukuran orang menjadi anomie (kebingungan) adalah di kala ia berhadapan dengan suatu kejadian atau perubahan yang belum pernah dialaminya dan di kala berhadapan dengan situasi yang baru, ketika harus menyesuaikan diri dengan cara –cara yang baru pula. Pada saat orang kehilangan pegangan, maka disaat itu pula ia akan merasakan suatu kritis, rawan dan mudah terpengaruh. Dengan lain perkataan, orang yang sedang dalam keadaan anomie sedikit banyak mempunyai kecenderungan untuk melakukan tindak kejahatan.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Ibid

Sifat umum dalam diri individu dapat dikategorikan atas beberapa macam :

1. Umur : sejak kecil hingga dewasa, manusia selalu mengalami perubahan-perubahan di dalam jasmani dan rohaninya. Dengan adanya perubahan-perubahan, maka tiap-tiap masa manusia dapat berbuat kejahatan, hanya ada perbedaan dalam tingkatan kejahatan, sesuai dengan perkembangan alam pikiran serta keadaan-keadaan lain yang ada di sekitar individu itu pada masanya.
2. Seks : hal ini berhubungan dengan keadaan fisik. Fisik laki-laki lebih kuat daripada wanita, maka kemungkinan untuk berbuat jahat lebih besar (kejahatan umum, bukan khusus).
3. Kedudukan individu dalam masyarakat
4. Pendidikan individu : hal ini mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku terutama intelegensianya.
5. Masalah rekreasi atau hiburan individu : walaupun kelihatan sepele, hal ini mempunyai hubungan dengan kejahatan, sebab sangat kurangnya rekreasi dapat pula menimbulkan kejahatan-kejahatan di dalam masyarakat.

2. Faktor-faktor yang bersumber dari luar tubuh individu (*ekstern*).

Faktor-faktor ini berpusat pada lingkungan di luar dari diri manusia (*ekstern*) terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas.

a. Faktor ekonomi

Pada umumnya faktor ekonomi mempunyai hubungan dengan timbulnya kejahatan, dimana pada perkembangan perekonomian di abad moderen, ketika tumbuh persaingan-persaingan bebas, menghidupkan daya minat konsumen dengan memasang iklan-iklan dan sebagainya. Hal ini cenderung menimbulkan keinginan-keinginan untuk memiliki barang atau uang sebanyak-banyaknya sehingga dengan demikian, seseorang mempunyai kecenderungan pula untuk mempersiapkan diri dalam berbagai cara penipuan dan sebagainya. Faktor ekonomi meliputi :

1. Perubahan-perubahan harga : dapat dikatakan bahwa keadaan-keadaan ekonomi dan kriminalitas mempunyai hubungan langsung, terutama mengenai kejahatan terhadap milik orang lain, atau katakanlah mengenai pencurian. Dalam keadaan pemikiran faktor ekonomi yang dimiliki tadi akan semakin berkurang. Dengan berkurangnya daya beli, seseorang akan menimbulkan perhitungan dan pertimbangan-pertimbangan itu masih dapat dikuasai, akan tetapi jika pada saat yang sama

terjadi penurunan nilai uang, penambahan tanggungan keluarga dan sebagainya yang pada pokoknya mempengaruhi standar hidup sehingga, menjadi begitu rendah. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya kriminalitas sebagai jalan keluar.

2. Pengangguran : kerana sempitnya lapangan kerja, penambahan penduduk, dan lain-lain sehingga dapat menyebabkan semakin banyaknya pengangguran. Pengangguran dapat dikatakan sebagai penyebab timbulnya kejahatan, yang kesemuanya itu dilator belakangi oleh kondisi buruk faktor ekonomi.
3. Urbanisasi : banyak dilakukan oleh penduduk, terutama di Indonesia dimaksudkan untuk memperbaiki nasib atau mengubah penghidupannya agar lebih baik daripada sebelumnya. Bayangan semacam ini tampaknya tidak semudah apa yang dikatakan orang, tetapi ternyata mereka yang telah turut dalam arus urbanisasi tidak sedikit yang mengalami kegagalan, frustasi dan sebagainya, yang kesemuanya itu banyak menimbulkan hal-hal yang negative.

b. Faktor Agama

Telah banyak usaha yang dilakukan untuk mengetahui sampai sejauh mana pengaruh faktor agama terhadap timbulnya kejahatan. Akan tetapi, nampaknya belum cukup



untuk mengetahui bahwa rendahnya nilai agama dapat mengakibatkan orang berbuat jahat. Norma-norma yang terkandung di dalam agama semua mengajarkan kebenaran dan kebaikan, dan agama itu senantiasa baik dan membimbing manusia kearah jalan yang benardan menunjukkan hal-hal yang dilarang dan yang diharuskan, mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga jika manusia benar-benar mendalami dan mengerti tentang isi agamanya, maka ia senantiasa akan menjadi manusia yang baik pula, tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan orang lain termasuk tindak kejahatan. Dan sebaliknya, jika agama itu, tidak berfungsi bagi manusia, hanya sekedar lambing saja, maka ia tidak berarti sama sekali, bahkan iman manusia menjadi lemah. Kalau sudah demikian keadaannya, maka orang mudah sekali untuk melakukan hal-hal yang buruk karena kontrol sosialnya tadi tidak kuat dan mudah melakukan tindak kejahatan.

c. Faktor Bacaan

Faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas yaitu faktor bacaan yang buruk, porno, criminal contohnya mulai dari cerita-cerita, gambar erotic dan pornografi dan yang berhubungan dengan seks sehingga cenderung dapat memberikan dorongan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau kejahatan.

d. Faktor film (termasuk televisi)

Pengaruh film terhadap timbulnya kriminalitas hampir sama dengan pengaruh bacaan, hanya beda terletak pada khayalan si pembaca atau penonton. Bacaan dapat menimbulkan khayalan secara tidak langsung tentang kejadian yang dibacanya, sedangkan penonton dapat langsung menganalogikan dirinya pada film yang sedang ditontonnya. Dapat dikatakan bahwa film tidak kalah besar pengaruhnya terhadap timbulnya kriminalitas dibandingkan bacaan.

**E. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan**

Kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan di samping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi timbulnya kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan sambil terus mencari cara tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Menurut **A.S Alam**, penanggulangan kejahatan terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu :

## **1. Pre-Entif**

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Entif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Entif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha Pre-Entif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

## **2. Preventif**

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Entif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukan kejahatan.

## **3. Represif**

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> A.S. Alam, *loc.cit.hal.* 79-80

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan metode kualitatif agar lebih dapat menggali informasi secara lebih luas dan detail dalam pemaparan hasil penelitian. Di samping itu penelitian dengan pendekatan metode kualitatif adalah merupakan prosedur penelitian yang diharapkan dapat menciptakan data yang obyektif, valid, dan efektif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang atau pelaku sehingga penyampaian informasi dari penulis ke pembaca dapat diterima sebagai suatu pengalaman. Dari pendekatan metode kualitatif tersebut dapat diartikan bahwa segala informasi yang diperoleh merupakan bentuk penjelasan yang diperoleh dari hasil penelitian yang akan dilakukan di lokasi penelitian yang telah ditentukan.

Penelitian ini adalah penelitian yang mengarah kepada studi kasus, yaitu suatu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan, atau mengimplementasikan suatu kasus (*case*) dalam konteks natural tanpa adanya suatu intervensi dari pihak lain.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Kecamatan Tallo Kota Makassar. Peneliti tertarik memilih lokasi ini karena disamping peneliti sudah mengetahui betul wilayah ini, juga informasi yang diperoleh dari tokoh masyarakat dan instansi pemerintah terkait seringnya terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Data primer, adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penelitian ini,
- 2) Data Sekunder, adalah data yang diperoleh melalui penelitian pustaka (*library research*) dengan cara membaca literatur berupa buku, tulisan ilmiah, buku—buku ilmu hukum, aturan perundang-undangan, Koran, majalah, dan lain sebagainya yang berhubungan erat dengan masalah yang akan diteliti.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

- 1) Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan dimaksud untuk mengumpulkan data sekunder yang merupakan kerangka dasar yang bersifat teoritis sebagai pendukung data empiris. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai referensi berupa buku-buku ilmu hukum, tulisan tentang ilmu hukum, media cetak, dan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

- 2) Penelitian lapangan

Penelitian lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data primer secara langsung pada objek-objek atau sumber data, sehingga untuk mendapatkan data yang akurat dan objektif, dilaksanakan

penelitian lapangan dengan melakukan wawancara terbuka pada pihak-pihak yang terkait.

#### **E. Analisis Data**

Selain semua data terkumpul yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang logis selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Kecamatan Tallo**

##### **1. Kondisi Geografis**

Kecamatan Tallo yang berada di bagian utara Kota Makassar, secara administratif terdiri dari beberapa kelurahan, yaitu (1) Kelurahan Tallo, (2) Kelurahan Buloa, (3) Kelurahan Kaluku Bodoa, (4) Kelurahan Suangga (5) Kelurahan Ujung Pandang, (6) Kelurahan Panampu, (7) Kelurahan Lembo, (8) Kelurahan Lembo, (9) Kelurahan Kalukuang, (10) Kelurahan La'latang, (11) Kelurahan Rappojawa, (12) Kelurahan Wala-walaya, (13) Kelurahan Rappokalling, (14) Kelurahan Lakkang, (15) Kelurahan Tammua

Secara geografis Kecamatan Tallo terletak pada posisi : 119 23 117 30 bujur timur dan 58-59 lintang selatan dengan perbatasan sebagai berikut :

1. Utara : Selat Makassar dan Kecamatan Biringkanaya
2. Timur : Kecamatan Biringkanayya
3. Selatan : Panakkukang dan Kecamatan Bontoala
4. Barat : Kecamatan Ujung Tanah

Seluruh wilayah administrasi Kecamatan Tallo berada di bawah kekuasaan Hukum Polsekta Tallo sebagai salah satu dari sekian elemen pelaksana utama Kewilayahan Mapolrestabes Makassar dan sebagai perpanjangan dari Polda Sulawesi Selatan ditingkat Kecamatan yang bertugas menyelenggarakan tugas-tugas pokok Polri dalam memelihara

keamanan dan ketertiban masyarakat dengan memberikan perlindungan, bimbingan, dan pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Tallo.

## **B. Data Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Membahas masalah kekerasan bukanlah hal yang mudah, sebab kekerasan pada dasarnya adalah merupakan tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh setiap orang, misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit, yang penyebabnya bermacam-macam..

Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan dalam rumah tangga serta upaya penanggulangannya, maka perlu diketahui terlebih dahulu data-data tentang kekerasan dalam rumah tangga di kecamatan Tallo. Maka penelitian ini hanya akan menyajikan data periode 2012 - 2014.

Bertolak dari aspek kriminologis serta beberapa pendapat yang telah dikemukakan oleh para pakar pada bab sebelumnya dalam kaitannya terhadap lokasi penelitian yang tentunya telah memberikan acuan dan kerangka berfikir bagi penulis, maka penulis juga menerangkan bahwa data Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kecamatan Tallo yang penulis akan tinjau adalah data yang bersifat kuantitatif, yang diperoleh dari tiga instansi penegak hukum yang penulis sebutkan di atas dan penulis paparkan sebagai berikut :



## 1. Data Polsek Kecamatan Tallo.

Dari hasil penelitian yang penulis peroleh dari Polsek Kecamatan Tallo Makassar Tahun 2012 sampai dengan 2014 tercatat jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya yang di laporkan ke Polsek Tallo Makassar sebanyak 58 kasus. Dan dari 58 kasus tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan oleh pihak yang berwenang semuanya adalah bentuk kekerasan fisik. Untuk lebih jelasnya maka penulis akan mengemukakan data-data yang dimaksud ke dalam bentuk tabel : Data Kasus Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kecamatan Tallo Laporan Polisi Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 Satuan Reskrim Polsek Tallo Makassar.

**Tabel 1 :**  
Data Laporan Polisi Tahun 2012 Unit Reskrim Polsek Tallo

No.	Bulan	Kasus Dilaporkan	Damai (Cabut Laporan)	Dilimpahkan Ke Pengadilan
1	Januari	1	1	-
2	Februari	1	-	1
3	Maret	2	1	1
4	April	4	2	2
5	Mei	-	-	-
6	Juni	4	3	1
7	Juli	2	1	1
8	Agustus	2	-	2
9	September	-	-	-
10	Oktober	1	1	-
11	November	-	-	-
12	Desember	1	-	1
Jumlah		<b>18</b>	<b>9</b>	<b>9</b>

**Sumber :** Bareskrim Polsek Tallo Makassar (17-02-2015)

Berdasarkan tabel di atas, maka pada tahun 2012 terdapat 18 (delapan belas) kasus tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan ke Polsek Kecamatan Tallo Kota Makassar. Dari jumlah tersebut, ada 9 (sembilan) kasus yang dapat diselesaikan dengan jalan damai (mencabut laporannya), dan selebihnya yaitu 9 (sembilan) kasus tindakan KDRT dilimpahkan ke pengadilan untuk penyelesaian selanjutnya.

**Tabel 2 :**  
Data Laporan Polisi Tahun 2013 Unit Reskrim Polsek Tallo

No.	Bulan	Kasus Dilaporkan	Damai (Cabut Laporan)	Dilimpahkan Ke Pengadilan
1	Januari	-	-	-
2	Februari	1	1	-
3	Maret	1	1	-
4	April	2	1	1
5	Mei	3	1	2
6	Juni	1	1	-
7	Juli	2	-	2
8	Agustus	-	-	-
9	September	-	-	-
10	Oktober	3	2	1
11	November	3	3	-
12	Desember	-	-	-
Jumlah		<b>16</b>	<b>10</b>	<b>6</b>

**Sumber** : Polsek Tallo Makassar (17-02-2015)

Menurut data yang di diperoleh peneliti terkait KDRT di wilayah hukum kecamatan Tallo pada tahun 2013, maka terdapat 16 (enam belas) kasus yang dilaporkan ke pihak kepolisian, dalam hal ini Polsek

Kecamatan Tallo Kota Makassar. Dari jumlah tersebut, 10 (sepuluh) diantaranya diselesaikan melalui jalan damai atau mencabut laporannya dan yang lainnya, yaitu 6 (enam) kasus dilimpahkan kepangadilan. Jika dibandingkan dengan kasus KDRT yang terjadi pada tahun 2012, yaitu sebanyak 18 kasus dan pada tahun 2013 terdapat 16 kasus, maka terdapat penurunan tindak kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 12,5 % tahun 2013.

**Tabel 3 :**

Data Laporan Polisi Tahun 2014 Unit Reskrim Polsek Tallo

No.	Bulan	Kasus Dilaporkan	Damai (Cabut Laporan)	Dilimpahkan Ke Pengadilan
1	Januari	1	1	-
2	Februari	4	2	2
3	Maret	-	-	-
4	April	1	-	1
5	Mei	-	-	-
6	Juni	4	2	2
7	Juli	-	-	-
8	Agustus	2	1	1
9	September	9	6	3
10	Oktober	1	1	-
11	November	-	-	-
12	Desember	2	1	1
Jumlah		<b>24</b>	<b>14</b>	<b>10</b>

**Sumber :** Polsek Tallo Makassar (17-02-2015)

Memperhatikan tabel di atas terdapat 24 kasus KDRT kurun waktu Januari s.d. Desember 2014, hal menunjukkan bahwa pada tahun 2014 terjadi peningkatan tindakan kriminal kekerasan dalam rumah tangga dari

tahun-tahun sebelumnya. Dari 24 kasus tersebut, 14 kasus diantaranya diselesaikan dengan jalan damai, dan 10 kasus dilimpahkan ke Pengadilan untuk diproses. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, maka terjadi peningkatan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang cukup tinggi pada tahun 2014, yaitu 33,33% dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan seluruh tabel di atas maka jumlah keseluruhan perkara kekerasan fisik dalam rumah tangga dari tahun 2012 sampai 2014 unit Reskrim Polsek Tallo mencapai 58 kasus di antaranya yang berhasil diselesaikan melalui upaya jalan damai sebanyak 33 kasus. Selebihnya yakni 25 kasus dilanjutkan prosesnya ke pengadilan untuk diselesaikan melalui upaya hukum pengadilan.

## **2. Data pengadilan**

Sebelum penulis memaparkan data kasus kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang pernah ditangani oleh pihak Pengadilan Negeri Makassar, maka terlebih dahulu penulis jelaskan bahwa lokasi penelitian berdasarkan judul skripsi penulis adalah di Polresta kecamatan Tallo, namun untuk mengetahui dan memahami upaya-upaya penanggulangan Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga lebih jauh maka penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar. Sehingga menjadi jelas kepada kita semua sampai sejauh mana proses penyelesaian hukumnya kasus-kasus yang telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Makassar.

**Tabel 5 :**

Data Kasus Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2011 Sampai dengan Tahun 2014.

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan
1.	2011	34	Putus
2.	2012	36	Putus
3.	2013	19	Putus
4.	2014	39	Putus
<b>Jumlah</b>		<b>120</b>	<b>Putus</b>

Sumber : *Pengadilan Negeri Makassar (23-02-2015)*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat sejumlah kasus yang ada dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, yaitu tahun 2011 sampai dengan 2014. Pada tahun 2011 terdapat 34 kasus KDRT yang diputus di Pengadilan Negeri Makassar. Sedangkan pada tahun 2012, ada 36 kasus yang diputus, dan jika dibandingkan dengan jumlah kasus yang diputus pada tahun sebelumnya, maka terdapat kenaikan sekitar 5,88% tahun 2012. Kemudian untuk tahun 2013 ada 19 kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar, di sini terdapat penurunan jumlah kasus KDRT sekitar 47,22%, dan pada tahun 2014 terjadi peningkatan jumlah kasus, yaitu 39 kasus yang di putus atau naik sekitar 105,26%.

### **C. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya KDRT**

Setelah penulis memaparkan data mengenai perkembangan tingkat Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yang penulis peroleh dari instansi yang terkait yakni, Kepolisian Polsek Tallo dan Pengadilan, maka sampailah penulis pada

faktor-faktor penyebab Terjadinya Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kecamatan Tallo kota Makassar. Masalah KDRT di Kecamatan Tallo Kota Makassar bukanlah hal yang baru untuk diperbincangkan, meskipun tempatnya berbeda akan tetapi faktor penyebabnya rata-rata sama.

Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kecamatan Tallo Kota Makassar, maka penulis melakukan wawancara dengan salah satu anggota Kepolisian Polsekta Tallo yaitu Kanit Reskrim Polsekta Tallo, Bapak **IPDA H. Andi Haseng, S.H** adapun hasil wawancara yang dilakukan kepada Kanit Reskrim Polsek Tallo Kota Makassar yaitu Bapak **IPDA H. Andi Haseng, S.H**, wawancara tanggal (17/02/2015), mengenai faktor-faktor penyebab Terjadinya Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kecamatan Tallo Kota Makassar disebabkan oleh 4 faktor yakni :

### **1. Orang Ketiga**

Kurangnya komunikasi antara suami dan istri menimbulkan sikap saling tidak jujur, tidak percaya, tidak terbuka, dan lain-lain yang mengakibatkan timbulnya rasa sakit hati, sehingga salah satu pihak yang merasa tidak dihargai mencari pelampiasan misalnya salah satunya dengan menjalin hubungan dengan orang ketiga sehingga lambat laun memicu suatu permasalahan dalam hubungan rumah tangga dan mengakibatkan hilangnya kondisi harmonis dan mengundang masalah, seperti pertengkaran dan bahkan terkadang sampai berujung atau berakhir dengan kekerasan dan kehancuran mahligai dalam rumah tangga.

## **2. Faktor Ekonomi**

Perilaku kejahatan dalam rumah tangga pada umumnya tidak terlepas dari pengaruh ekonomi atau status social ekonomi yang rendah dan sangat lemah, faktor materi atau uang merupakan faktor yang kadang kala terbukti paling besar peranannya dalam memungkinkan timbulnya suatu kejahatan. Faktor ekonomi tidak hanya mempengaruhi masyarakat secara luas akan tetapi lebih jauh kedalam bahkan sampai pada hubungan rumah tangga, tidak memandang status, seperti biologis ataupun fisik, karena pada hakikatnya setiap individu selalu ingin memenuhi kebutuhannya masing-masing, hal ini biasanya kerap mewarnai suatu perselisihan dalam hubungan berumah tangga, yang memicu timbulnya berbagai macam kejahatan yang salah satunya seperti kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, yang hingga kini cukup banyak menimbulkan korban bagi kaum perempuan.

## **3. Minuman Keras**

Minuman Keras merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan, termasuk dalam hal ini kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, dan apabila dikaitkan dengan kondisi Kecamatan Tallo yang masih tergolong daerah tertinggal dimana masih banyak perumahan-perumahan kumuh dan kondisi masyarakat yang umumnya masih memiliki pendapatan minim dan tingkat kesadaran rendah ditambah dengan budaya yang terbelang masih cukup kental, dimana minuman keras masih dianggap sebagian orang sebagai alternatif pemecahan masalah yang mereka alami di lingkungan sekitar, akan tetapi terkadang semua baru

terlampiaskan dirumah dan kemudian yang menjadi sasaran adalah keluarganya, akibat berada dibawah pengaruh minuman keras dan segala tindakannya diluar control mereka sendiri yang pada akhirnya menimbulkan masalah dan mempengaruhi ke harmonisan keluarga, dan menimbulkan masalah dalam rumah tangga. Seperti kekerasan fisik dalam rumah tangga dan lain-lain.

#### **4. Terdesak, Tersiksa dan Terpaksa**

Posisi laki-laki sedemikian dominan seringkali menyebabkan dirinya menjadi penguasa ditengah-tengah lingkungan keluarganya, bahkan pada saat laki-laki melakukan kekerasan dalam rumah tangga tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya. Karena perilakunya tersebut dianggap sebagai hak istimewa yang secara kodrat melekat pada diri mereka. Hal ini merupakan salah satu persoalan yang mengakibatkan banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan penganiayaan.

Dalam rumah tangga biasanya. merasa tertekan dan tersiksa, atas apa yang di deritanya dalam kehidupannya, sehingga dalam keadaan terdesak dan tersiksa ia terpaksa harus melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum ataupun kodratnya, misalnya kekerasan yang dilakukan oleh perempuan, seperti melakukan penganiayaan atau bahkan pembunuhan dalam rumah tangganya sendiri.

Untuk lebih mengetahui dan memperkuat hasil wawancara yang disampaikan oleh pihak Kepolisian, maka pada penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung dengan responden, yaitu pelaku Kejahatan Kekerasan Fisik dalam rumah tangga yang sedang dalam penahanan pihak kepolisian, yaitu :



“Laki-laki berinisial (HS), wawancara (Tanggal 17-02-2015), dan korbannya adalah istrinya berinisial (S). Peristiwa ini bermula ketika ada seseorang yang melakukan SMS kepada HS (suaminya) yang isi SMSnya adalah memberitahukan bahwa istrinya (S) telah berselingkuh dengan seseorang berinisial (HH). Ketika SMS tersebut dikonfirmasi kebenarannya kepada sang istri, sang istri mengatakan bahwa itu hanya teror belaka dan tidak benar, itu hanya mau merusak keluarga saja. Pada suatu hari SMS yang sama datang lagi, yang inti SMS tersebut adalah bahwa kalau bapak (HS) tidak percaya bahwa istri bapak selingkuh, maka sekarang datanglah ke alamat seperti yang saya tunjukkan di SMS tadi. Setelah saya membaca SMS tersebut saya langsung menuju ke alamat seperti yang ditunjukkan tadi, saya bersama saya punya anak (R) dan setelah saya sampai di sana saya jumpai istri saya (S) sedang bersama dengan seorang laki-laki. Saya tidak pukul di tempat dimana kejadian. Nanti setelah sampai di rumah saya tanya kembali dan masih tetap menyangkal. Ia (S) mengatakan bahwa itu adalah teman biasa saja. Saya mulai marah dan naik pitam, sehingga tanpa saya sadari saya langsung memukul. Istri saya (S) tidak terima diperlakukan seperti itu dan akhirnya saya dilapor ke Polsek Tallo, begitu kejadiannya”.

#### **D. Bentuk-bentuk Tindakan KDRT**

Bentuk tindakan KDRT yang sering terjadi di dalam masyarakat adalah meliputi : **pertama**, kekerasan fisik yang berakibat pada timbulnya rasa sakit dan luka yang disebabkan karena benda tumpul (pemukulan), **kedua**, kekerasan psikis seperti perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya kepercayaan diri, dan rasa tidak berdaya dan **ketiga**, tindakan dalam bentuk kekerasan seksual, dan **keempat**, tindakan penelantaran rumah tangga yaitu meninggalkan atau membiarkan keluarganya tanpa ada nafkah sedikitpun kepadanya. Misalnya seorang suami meninggalkan istri dan anaknya karena sebelumnya terjadi pertengkaran dalam keluarga.

Dari data yang diperoleh peneliti dilapangan yang bersumber dari Bareskrim Polsek Tallo, tentang bentuk-bentuk KDRT di Kecamatan Tallo, dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5 :  
Bentuk-bentuk tindakan KDRT di Kecamatan Tallo Makassar

No.	Tahun	Bentuk Kekerasan				Jumlah
		Fisik	Psikis	Seksual	Penelantaran	
1	2012	18	-	-	-	18
2	2013	16	-	-	-	16
3	2014	24	-	-	-	24
Jumlah		58	-	-	-	58

**Sumber** : Polsekta Tallo Makassar (17-02-2015)

Akan tetapi berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari lapangan yang bersumber dari Bareskrim Polsek Tallo, bahwa dari sejumlah kasus KDRT di kecamatan Tallo rata-rata adalah bentuk kekerasan fisik.

## E. Upaya-Upaya Penanggulangan KDRT

### 1. Upaya Penanggulangan Oleh Pihak Kepolisian

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yaitu, Bareskrim Polsek Tallo (**Ipda. H. Andi Haseng, SH**) tanggal 17 Februari 2015, terkait upaya penanggulangan terhadap KDRT di Kecamatan Tallo dijelaskan bahwa salah satu program Kapolsek Tallo (**Kompol. Woro Susilo**) dalam mengurangi/menanggulangi tindak kejahatan di Kecamatan Tallo adalah :

#### a. Program RKS (Ruang Konsultasi Solusi).

Dengan program ini pihak Polsekta Tallo memediasi masyarakat yang memiliki masalah dan memberikan penyelesaian masalah kepada mereka sebelum diproses lebih lanjut. Dengan cara ini, banyak kasus-

kasus sedang dan ringan yang tak perlu dilanjutkan menjadi laporan polisi (LP). Selain itu, Polsekta Tallo juga berhasil menerapkan *Zona Zero Crime* atau kawasan bebas tindakan kriminal yaitu kelurahan Lakkang Kecamatan Tallo Kota Makassar.

Kasus-kasus kriminal yang dihadapi oleh Polsekta Tallo sangat beragam mulai dari KDRT, perkelahian, pencurian, hingga penambretan.

#### **b. Petugas Kepolisian Nginap di Rumah Warga**

Terdapat beberapa program Polsekta Tallo untuk meredam tindak kriminal selain RKS, yakni mengajak para petugas kepolisian diujarannya untuk lebih dekat dengan warga. Hal ini dilakukan untuk mendekatkan petugas kepolisian dengan warga dan untuk melihat respon warga. Selain itu ada pemutaran film di lorong bersama warga. Film itu nantinya akan dijadikan bahan diskusi antara warga dengan kepolisian “dalam menciptakan stabilitas keamanan” bukan hanya merubah perilaku saja, tetapi juga bagaimana merubah *mindset* masyarakat.

Disamping program penanggulangan di atas, Polsekta Tallo juga menerapkan metode sebagai berikut :

##### **a. Upaya *Pre-Entif***

1. Secara umum dengan cara menanamkan pendidikan agama dan nilai-nilai yang baik kepada anak-anak kita sejak kecil sehingga nilai-nilai itu tertanam dalam hati nurani mereka dan tidak melakukan tindakan melawan hukum..
2. Memberikan penyuluhan dan pendidikan kepada mereka yang akan melangsungkan pernikahan agar menumbuhkan

kesadaran dan menghayati makna dari perkawinan itu sendiri sehingga terbina rumah tangga yang damai, tenteram, bahagia lahir dan batin.

*b. Upaya Preventif*

1. Dalam kasus KDRT pihak kepolisian berusaha melakukan upaya perdamaian atau mediasi dengan cara memberi masukan-masukan dan solusi kepada para pihak yang bermasalah. Mengingat masalah KDRT yang menjadi pertimbangan pokoknya adalah masa depan anak jika tidak di asuh langsung oleh kedua orang tuanya.
2. Pihak Kepolisian saling berkoordinasi dengan masyarakat melalui sosialisasi mengenai Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengatur secara tegas sanksi bagi pelaku KDRT sehingga diharapkan dapat mengurangi terjadinya tindak pidana dalam rumah tangga.

*c. Upaya Represif*

Meliputi Penegakan Hukum dengan cara Penindakan secara langsung berdasarkan laporan korban kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi, penangkapan, pemeriksaan, penyidikan hingga langkah tegas sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukannya. Apabila pelaku terbukti melakukan kekerasan maka akan ditindak lanjuti menurut hukum yang berlaku, namun terlebih dahulu tetap memperhatikan dan mempertimbangkan aspek manfaat bagi ke dua belah pihak, demi keharmonisan keluarga.

## **2. Upaya Penanggulangan Oleh Pihak Pengadilan Negeri Makassar**

Dari data yang diperoleh peneliti di Pengadilan Negeri Makassar melalui wawancara dengan **Mustari Muis, SH** ( 5 Maret 2015) mengatakan bahwa dengan putusan hakim yang dijatuhkan kepada mereka (terdakwa), dapat diharapkan memberikan efek jera terhadap perilaku KDRT yang dilakukannya. Disamping itu ada beberapa metode yang diterapkan oleh pihak Pengadilan Negeri Makassar sdalam penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Makassar, antara lain :

### *a. Upaya Pre-Entif*

Memberikan penyuluhan dan pendidikan pra-nikah agar menumbuhkan kesadaran dan menghayati makna dari perkawinan itu sendiri yang tujuannya membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

### *b. Upaya Preventif*

Pemerintah bersama-sama pihak Kepolisian saling berkoordinasi dengan masyarakat melalui sosialisasi mengenai Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengatur secara tegas sanksi bagi pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga diharapkan dapat mengurangi terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

### *c. Upaya Represif*

Berupa penegakan hukum dengan cara penjatuhan sanksi yang adil dan tegas sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukannya

dengan tetap memperhatikan aspek yang bisa sedikit meringankan masa hukuman pelaku antara lain :

1. Jika pelaku memiliki anak maka dikhawatirkan perkembangan dan masa depannya kelak, jika salah satu atau kedua orang tuanya tidak mendidik secara langsung dalam waktu yang lama.
2. Si pelaku telah sadar dan menyesali perbuatannya tersebut dimana sesuai dari tujuan penjatuhan sanksi pidana yaitu memperbaiki seseorang dan bukan malah mendzaliminya.

Sehingga berdasarkan putusan pengadilan yang telah diberikan kepadanya diharapkan menimbulkan efek jera bagi si pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di kecamatan Tallo Makassar yaitu :
  - a. Minuman Keras : Minuman keras merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan, termasuk KDRT.
  - b. Orang Ketiga : Kurangnya komunikasi antara suami dan isteri dan tidak adanya saling percaya, tidak terbuka, serta tekanan yang berkepanjangan mengakibatkan timbulnya rasa sakit hati, sehingga salah satu pihak yang merasa tidak dihargai mencari pelampiasan dengan menjalin hubungan dengan orang ketiga sehingga lambat laun memicu suatu permasalahan.
  - c. Faktor Ekonomi : Masalah akan muncul apabila terjadi suatu keadaan yaitu kurangnya sumber pendapatan dan kemudian mendapat tekanan yang berlebihan berpotensi munculnya KDRT dalam keluarga
  - d. Terdesak, Tersiksa dan Terpaksa : Kondisi ini dapat memicu pembalasan yang berlebihan sebagai bentuk pelampiasan penderitaan yang dialami.

2. Dari sejumlah kasus KDRT di kecamatan Tallo, rata-rata adalah bentuk kekerasan fisik.
3. Upaya penanggulangan kejahatan KDRT dan kejahatan pada umumnya melalui pendekatan Pre-Emtif, Preventif, dan Represif.

#### **B. Saran**

1. Diharapkan adanya sinergitas antara kepolisian, pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama dalam upaya penanggulangan tindak kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga tindak kejahatan baik fisik maupun psikis dapat ditekan sekecil mungkin.
2. Diharapkan kepada para penegak hukum untuk memberikan hukuman yang sesuai tanpa pandang bulu, serta mengurangi upaya damai dan proses hukumnya tetap berjalan, sehingga dengan demikian hal inia dapat memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan kekerasan dalam rumah tangga.
3. Diberlakukannya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diharapkan kepada penegak hukum atau pihak-pihak yang berwenang agar lebih intensif mensosialisasikan undang-undang ini kepada masyarakat untuk diketahui.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam.** 2006. *Prospek Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Restu Agung.
- Abdulsyani.** 1987. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remaja Karya.
- Adami Chazawi.** 2002. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta:
- \_\_\_\_\_.2009. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Surabaya: PMN.
- A.S. Alam.** 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Bryne Done, at.al.** 2005. *Psikologi Sosial Edisi Kesepuluh*. Jakarta : Erlangga.
- I.S. Susanto.** 1991. *Diklat Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang*. Semarang.
- Leden Marpuang.** 2008. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- ,2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljatno.** 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nandang Sambas.** 2010. *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nursyahbani Katjasungkana.** 2002. *Keadilan Hukum Untuk Perempuan Korban Kekerasan , Jurnal Perempuan No. 26*. Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan.
- P.A.F. Lamintang.** 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.
- Singgih Gunarsa.** 2007. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Topo Santoso.** 2014. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wirjono Prodjodikoro.** 2003. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Yesmil Anwar, et.al.** 2013. *Kriminologi*. Bandung : PT. Refika Aditama.

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.